

Ta'amul: Journal of Islamic Economics

Vol. 4, No. 1, May 2025, E-ISSN: [2964-0644](https://doi.org/10.58223/taamul.v4i1.391)

Doi: <https://doi.org/10.58223/taamul.v4i1.391>

Wealth and Inequality: A Qualitative Inquiry into Institutional Dysfunction in Resource-Rich Muslim Nations

Teni Solihat

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia
solihattenii@gmail.com

Abdul Karim Amrullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia
ayunk9608@gmail.com

Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia
nurlailiyah@darussalamuniversity.ac.id

Abstract

Keywords: Institutions, Natural Resources, Muslim-Majority Nations, Governance Dysfunction, Development Inequality.

Several Muslim-majority countries endowed with abundant natural resources (NR) continue to face persistent development stagnation and severe social inequality, raising critical questions about the paradox of resource wealth. This study aims to qualitatively examine how institutional dysfunction influences wealth distribution and development trajectories in these contexts. Employing a qualitative approach with a case study design, the research focuses on resource-rich Muslim-majority countries, using Indonesia as a primary case due to its substantial natural resources and Muslim population exceeding 80%. Data were collected through policy document analysis and triangulated with media reports to ensure validity. Findings reveal that weak institutional capacity, entrenched corruption, and the dominance of political-economic elites are key drivers of persistent inequality and developmental inertia. These

structural deficiencies prevent resource wealth from translating into broad-based prosperity, instead reinforcing elite capture and social disparity. The study contributes to the literature on resource governance by demonstrating that natural resource abundance, without robust institutional frameworks, intensifies the resource curse in Muslim-majority contexts. Practical implications underscore the urgency of institutional reform and the design of governance models tailored to socio-cultural and political realities, aiming to achieve inclusive and sustainable development. This research advances understanding of the intersection between institutional quality, resource wealth, and inequality, offering policy insights for governments and international development agencies operating in similar contexts.

Abstrak

Kata Kunci: Kelembagaan, Sumber Daya Alam, Negara Muslim, Disfungsi Pemerintahan, Ketimpangan Pembangunan.	Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah masih menghadapi stagnasi pembangunan dan ketimpangan sosial yang parah, sehingga menimbulkan paradoks kemakmuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kualitatif bagaimana disfungsi institusional memengaruhi distribusi kekayaan dan proses pembangunan di negara-negara mayoritas Muslim yang kaya sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini difokuskan pada negara-negara yang memiliki populasi Muslim lebih dari 50% dan kekayaan SDA yang signifikan, dengan Indonesia sebagai sampel utama karena memiliki lebih dari 80% penduduk Muslim dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan dan triangulasi dengan laporan media untuk memastikan validitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas institusional, korupsi yang mengakar, serta dominasi elite politik-ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi tetap berlangsung dan menghambat percepatan pembangunan. Studi ini menegaskan bahwa kelimpahan sumber daya alam tanpa tata kelola institusi yang kuat justru memperburuk krisis pembangunan. Implikasi praktis penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan pengembangan model tata kelola yang kontekstual agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tata kelola sumber daya dengan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kualitas institusi, kekayaan SDA, dan ketimpangan, serta menawarkan wawasan kebijakan bagi pemerintah dan lembaga pembangunan internasional.
--	---

Received: 03-05-2025, Revised: 28-06-2025, Accepted: 19-07-2025

© Teni Solihat, Abdul Karim Amrullah, Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah mengalami peningkatan globalisasi yang pesat hamper diseluruh bagian, baik dalam interaksi ekonomi maupun social budaya (Bonaraja Purba et al., 2023). Secara umum, globalisasi tidak hanya mempercepat proses transaksi pertukaran barang, jasa, dan informasi antar negara, namun juga menciptakan hubungan ketergantungan antar bangsa, khususnya dalam pengelolaan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (Maiwan, 2014). Bagi banyak negara berkembang, khususnya yang kaya akan sumber daya alam, globalisasi menjadi pedang bermata dua: di satu sisi globalisasi memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Negara - negara dengan populasi mayoritas muslim dikaruniai sumberdaya alam yang melimpah sering kali terjebak dalam paradoks ini. Meskipun memiliki potensi kaya dibidang pertambangan, minyak bumi, gas alam, dan kekayaan lainnya, banyak di negara - negara ini masih menghadapi tantangan yang serius dalam hal distribusi kekayaan yang adil, pengembangan sumber daya manusia, dan stabilitas sosial (Sholikin, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa fenomena ini kelimpahan sumber daya alam tidak secara langsung menjamin kemakmuran. Sebaliknya dalam Sebagian besar kasus, kekayaan sumber daya alam cenderung menjadi sumber konflik, korupsi, dan institusi yang disfungsional, yang menggerogoti kapasitas negara untuk mengelola secara efektif dan tidak memihak.

Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam sering kali membuat negara - negara ini berisiko terhadap fluktuasi harga komoditas global, mengukuhkan ekonomi yang mengambil sumber daya alam dan menghambat pertumbuhan penganekaragaman ekonom negara tersebut (Mumu, 2023). Selain itu, lemahnya institusi pemerintahan termasuk lemahnya supremasi hukum,

rendahnya akuntabilitas publik, serta maraknya praktik nepotisme dan kolusi memperparah ketidakmerataan distribusi hasil kekayaan negara. Disfungsi institusional ini tidak hanya memperdalam ketimpangan sosial, tetapi juga menghambat upaya reformasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks negara – negara dengan moyoritas muslim, fenomena ketimpangan dan kekayaan sering kali dipengaruhi oleh Sejarah, politik, serta budaya yang kompleks. Elemen – elemen seperti warisan colonial, politik negara, dan bahkan interpretasi domestic atas nilai – nilai agama dalam pemerintahan memiliki dampak yang dalam pada realitas lanskap sosial dan ekonomi (Nasution et al., 2023). Oleh karena itu, menganalisis hubungan antara kekayaan sumber daya alam, ketidaksetaraan social, serta disfungsi institusi memrlukan pendekatan kontekstual dan holistic di negara – negara ini.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab bagaimana interaksi antara kekayaan sumber daya alam, ketergantungan global, dan kerapuhan institusi menyebabkan pola ketidak setaraan sitematik di negara – negara muslim yang kaya sumber daya melalui studi kualitataif. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, dalam pengelolaan sumber daya alam bangsa.

Meskipun kajian tentang hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat kuantitatif dan ekonometrik. Studi-studi ini banyak menggunakan data makro ekonomi untuk mengukur hubungan antara indikator seperti PDB, indeks Gini, dan ketergantungan ekspor SDA. Misalnya, studi oleh Sachs dan Warner (2001) mengenai resource curse menjadi rujukan utama yang berfokus pada korelasi statistik antara kekayaan sumber daya dan kinerja ekonomi (Rahma et al., 2021). Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan dimensi sosial-politik, dinamika internal kelembagaan, serta kompleksitas hubungan antara pemegang peran dalam negara.

Di sisi lain, terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara spesifik mengkaji peran nilai-nilai sosial, budaya politik, dan identitas keagamaan dalam

mempengaruhi tata kelola di negara-negara mayoritas Muslim yang kaya SDA. Padahal, dalam konteks negara-negara ini, agama dan budaya lokal memainkan peran signifikan dalam membentuk legitimasi politik, distribusi kekuasaan, dan perilaku ekonomi (Fauza, 2020). Studi seperti yang dilakukan oleh Cammett dan Jones Luong (2014) mulai menyentuh aspek ini, namun masih terbatas dalam cakupan kasus dan belum mendalam dalam menggali interaksi nilai-nilai tersebut dengan struktur institusional (Party, 2013).

Selain itu, minimnya studi komparatif-kualitatif yang berfokus pada pengalaman empiris negara-negara Muslim dengan kekayaan Sumber Daya Alam tinggi menjadi kekosongan lain dalam literatur akademik.

Dalam konteks dunia yang terus berubah, khususnya pasca-pandemi COVID-19 dan di tengah transformasi geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina yang memperkaya negara-negara eksportir energi, kebutuhan untuk memahami dimensi sosial-politik dan keragaman pengalaman empiris menjadi semakin mendesak (CNN, 2022). Laporan Natural Resource Governance Institute (NRGI, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara kaya SDA mengalami "booming" fiskal, namun tanpa reformasi institusional yang kuat, ketimpangan justru melebar.

Demikian pula, (World Inequality Report 2022) mencatat bahwa di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara kawasan mayoritas Muslim ketimpangan kekayaan dan pendapatan masih yang tertinggi di dunia, dengan 10% orang terkaya menguasai lebih dari 60% pendapatan nasional . Ini memperkuat argumen bahwa faktor sosial, budaya, dan politik tidak bisa diabaikan dalam memahami ketimpangan.

Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif eksploratif yang relatif belum banyak diadopsi dalam studi terkait hubungan antara kekayaan sumber daya alam, ketimpangan, dan disfungsi institusional di negara-negara mayoritas Muslim. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih dominan menggunakan metode kuantitatif dan ekonometrik, penelitian ini mengedepankan analisis mendalam terhadap praktik kelembagaan serta narasi

aktor lokal yang hidup dalam dinamika sosial-politik sehari-hari. penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara realitas empiris di negara mayoritas Muslim yang kaya SDA dengan kebutuhan pengembangan teori dan praktik pembangunan berkelanjutan berbasis institusi yang kuat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus ganda (multiple case studies). Strategi ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap variasi dinamika sosial, politik, dan kelembagaan di beberapa negara mayoritas Muslim yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) signifikan, namun menghadapi tantangan serius dalam tata kelola institusional.

Negara yang dipilih sebagai objek studi ditentukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: Mayoritas penduduk Muslim (lebih dari 50% populasi), Kekayaan sumber daya alam signifikan (diukur melalui kontribusi SDA terhadap PDB nasional atau volume ekspor), Peringkat indeks kelembagaan rendah, berdasarkan indikator seperti Worldwide Governance Indicators (WGI) dan Resource Governance Index (RGI). Sebagai ilustrasi, negara seperti Indonesia dipilih karena memenuhi ketiga kriteria tersebut: mayoritas Muslim, kekayaan SDA melimpah (sektor tambang, energi, dan hasil bumi), dan memiliki tantangan institusional sebagaimana tercermin dalam skor tata kelola (WGI 2022: skor efektivitas pemerintahan sebesar -0,21 dan skor kontrol korupsi sebesar -0,43) (Sinaga et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen: Observasi Kontekstual, Analisis Narasi Media. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari berbagai sumber data.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni: Membandingkan data yang diperoleh dari dokumen resmi, hasil observasi lapangan, dan narasi media, Melibatkan analisis dari sudut pandang berbagai aktor, baik aktor negara (pemerintah, lembaga

pengelola SDA) maupun non-negara (masyarakat sipil, media, organisasi internasional). Triangulasi media dari laporan investigatif media kredibel (CNBC indonesia, BBC Indonesia, CNN indonesia). Analisis data dilakukan melalui teknik tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola disfungsi institusional. Dengan menggunakan triangulasi sumber ini, diharapkan hasil penelitian memiliki kekuatan validitas internal yang tinggi dan mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif. Diskusi dan Temuan

Result and Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara mayoritas Muslim yang kaya akan sumber daya alam mengalami ketidakseimbangan signifikan antara kekuatan ekonomi yang berasal dari eksplorasi SDA dan kelemahan dalam fungsi pengawasan, akuntabilitas, serta transparansi institusi negara.

Gambar 1: Hasil statistik sumber daya alam berupa tambang



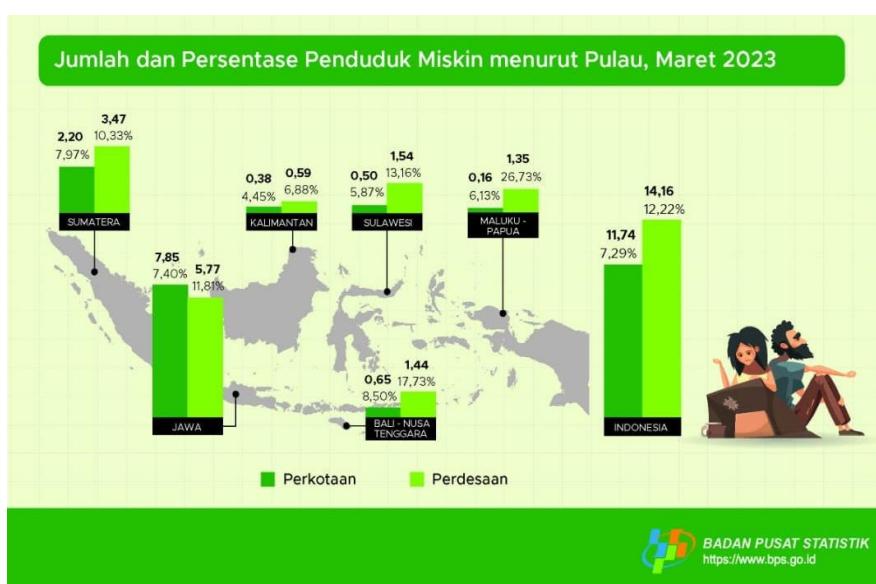
Dari hasil data statistik yang menampilkan sumber daya alam yang dimiliki indonesia salah satunya adalah bahan tambang dari tahun 2023 dengan capaian hasil batu bara 614.058.577 ton, basukit 25.781.187 ton, emas 78.996kg,

Konsentrat Tin 52.467 tonmertrik, Konsentrat Tembaga 3.377.023 Tonmetrik, Bijih Nikel 65.509.854. dengan rata-rata pencapaian tiap tahunnya meningkat dapat dinyatakan bahwa indonesia merupakan penghasil sumber daya alam yang tinggi akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa mayoritas penduduknya berada didalam lingkaran kemiskinan terutama didaerah sekitar tambang.

Contoh kasus ketimpangan pada daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang tinggi ke 2 di indonesia akan tetapi mayoritas masyarakatnya masih dalam belenggu kemiskinan yaitu daerah di Sumatera Selatan tepatnya di Palembang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Palembang sebagai daerah dengan tambang batu bara terbesar di indonesia akan tetapi hamper 1 juta warganya mengalami kemiskinan (CNN, 2024).

Selain di wilayah sumatera selain ada juga daerah papua yang merupakan pusat kekayaan sumber daya alam dengan berada diposisi paling atas penghasil bijih dan timah akan tetapi pada dasarnya papua masih dalam ketimpangan ekonomi dan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di indonesia pada tahun 2023, yang tercatat sebanyak 26,73% penduduk di papua masih hidup dalam kemiskinan.(NCCNews.com, 2025)

Gambar 2: Presentase penduduk miskin di indonesia.



(BPS, 2023)

Pada data statistik ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia memiliki kekayaan akan sumber daya alam akan tetapi mayoritas penduduknya masih berada digaris kemiskinan.

Menurut para ahli hal ini dapat disebabkan dari pola struktural dimasyarakat, ada yang perlu diubah secara struktural, menurut para ahli pemerintah bisa merubah mulai dari sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut.

Menggunakan kerangka teori kelembagaan (institutionalism), ditemukan bahwa lemahnya institusi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas administratif, tetapi juga oleh ketidakstabilan norma-norma institusional, rendahnya budaya akuntabilitas, serta adanya resistensi terhadap reformasi oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Sementara itu, dalam perspektif teori negara rentier, ketergantungan terhadap pendapatan sumber daya menyebabkan negara kehilangan insentif untuk membangun basis ekonomi yang lebih produktif. Pemerintah lebih memilih distribusi rente kepada kelompok elit dan relasi didalam politik, daripada memperkuat kapasitas institusional secara menyeluruh.

Contoh kasus pada tambang timah yang ada di Bangka Belitung merugikan negara sebanyak Rp. 271 Triliun yang dilakukan sejumlah perusahaan petinggi-petinggi diperusahaan dan melakukan kegiatan ilegal yang merugikan ekosistem di sekitar wilayah serta berdampak juga pada sektor perekonomian (CNBC, 2024).

Fenomena elite capture dan pemangku kepentingan politik memperparah ketimpangan. Elite politik dan ekonomi serta cenderung menguasai distribusi kekayaan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan, mengorbankan pembangunan institusi yang seharusnya melayani kepentingan publik secara adil dan transparan.

Kerugian yang dialami negara pada tambang ilegal.



Berdasarkan estimasi yang disusun dari laporan investigatif dan data sektoral, total kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal meningkat signifikan dari sekitar Rp 95 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 271 triliun pada tahun 2023. Lonjakan ini menandai lemahnya pengawasan terhadap sektor pertambangan serta besarnya potensi kehilangan pendapatan nasional akibat praktik ekstraktif ilegal (Agustiyani, 2024)

Narasi media dan laporan kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, proyek-proyek SDA sering kali tidak dinikmati secara merata oleh masyarakat luas, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki akses politik.

Kebijakan reformasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada penguatan transparansi, partisipasi publik, mekanisme checks and balances, serta pemberdayaan masyarakat sipil untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mencakup tambang, migas, dan hasil hutan. Namun, kenyataan menunjukkan mayoritas penduduknya masih hidup di garis kemiskinan. Fenomena ini dikenal sebagai resource paradox atau paradoks

sumber daya, di mana kekayaan SDA justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada tata kelola dan distribusi hasil kekayaan yang tidak merata.

Menurut pandangan sejumlah ahli, kondisi ini disebabkan oleh pola struktural yang mengakar dalam masyarakat. Struktur ekonomi dan politik yang timpang menyebabkan pengelolaan SDA hanya menguntungkan segelintir pihak. Perubahan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola SDA dan pembaruan regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Tanpa transformasi kelembagaan, kebijakan pengelolaan SDA akan terus berjalan dalam pola lama yang menimbulkan ketimpangan.

Dalam kerangka teori kelembagaan (institutionalism), lemahnya institusi menjadi penyebab utama kegagalan pemanfaatan SDA. Masalah ini tidak hanya muncul karena rendahnya kapasitas administratif, tetapi juga ketidakstabilan norma, rendahnya budaya akuntabilitas, serta resistensi kelompok kepentingan terhadap reformasi. Ketiga faktor ini membentuk lingkaran setan, di mana kebijakan lebih mengakomodasi kepentingan elit daripada menciptakan tata kelola yang adil. Lemahnya institusi juga membuat proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran SDA menjadi tidak efektif.

Melalui perspektif teori negara rentier, ketergantungan pada pendapatan SDA membuat pemerintah kehilangan dorongan untuk mengembangkan sektor produktif lainnya. Pola distribusi rente kepada kelompok elit dan relasi politik menjadi strategi yang lebih menguntungkan bagi penguasa daripada memperkuat kapasitas institusional. Akibatnya, fenomena elite capture semakin dominan, di mana kekayaan SDA digunakan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Situasi ini memperparah stagnasi pembangunan dan memperdalam jurang ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Kasus tambang timah di Bangka Belitung yang merugikan negara Rp 271 triliun (CNBC, 2024) menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola SDA di Indonesia. Praktik ilegal yang melibatkan petinggi perusahaan dan aktor politik tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak ekosistem dan memukul ekonomi lokal. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa kekayaan SDA, tanpa tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel, justru menjadi sumber kerusakan struktural. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, penguatan akuntabilitas, dan penerapan tata kelola berbasis kepentingan publik menjadi urgensi untuk memutus rantai ketergantungan dan mengatasi ketimpangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia tidak secara otomatis mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa tata kelola kelembagaan yang kuat dan akuntabel, kekayaan tersebut justru berkontribusi pada pembentukan ketimpangan dan reproduksi praktik-praktik eksklusif oleh elite politik dan ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan dan teori negara rentier, studi ini mengungkap bahwa disfungsi institusional tercermin dalam lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta dominasi aktor-aktor tertentu dalam pengelolaan SDA. Fenomena elite capture dan politik memperparah ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah penghasil SDA yang justru tertinggal dari segi infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang berorientasi pada transparansi, partisipasi masyarakat lokal, serta distribusi manfaat SDA yang lebih adil. Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman teoretis yang lebih dalam mengenai hubungan antara SDA dan kelembagaan, tetapi juga pada tawaran arah kebijakan untuk pembangunan yang lebih inklusif dan kontekstual di negara-negara mayoritas Muslim.

References

- Agustiyani. (2024). *Hitungan Kerugian Negara akibat Korupsi Timah Harvey Moeis Rp 271 T.* BERITA.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/6609256bada11/hitungan-kerugian-negara-akibat-korupsi-timah-harvey-moeis-rp-271-t>
- Bonaraja Purba, Anjel Ezania Sihombing, Nazwa Fazirah Nasution, & Arnol Prabowo Siagian. (2023). Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 402–414.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1925>
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 47, 1–16.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- CNBC. (2024). *kasus korupsi timah bikin rugi Rp.271 T ini asal usal rinciannya*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240406111011-17-528982/kasus-korupsi-timah-bikin-rugi-rp271-t-ini-asal-usal-rinciannya>
- CNN. (2022). *6 Dampak Ekonomi Yang Timbul Akibat Konflik Rusia-Ukraina*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220224142521-92-763522/6-dampak-ekonomi-yang-timbul-akibat-konflik-rusia-ukraina>
- CNN. (2024). *kenapa kemiskinan bisa merajalela di daerahkaya tambang dan sda ri*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240723062737-85-1124326/kenapa-kemiskinan-bisa-merajalela-di-daerah-kaya-tambang-dan-sda-ri>
- Fauza, N. (2020). Legitimasi politik tokoh agama: kajian interpretatif masyarakat multiagama di kabupaten nganjuk. *Jurnal Lentera*, 143–161.
- Maiwan, M. (2014). MEMAHAMI POLITIK GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA DALAM TATA DUNIA BARU: ANTARA

- PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v7i1.3098>
- Mumu. (2023). KAJIAN TEORITIS TENTANG KEMAMPUAN BANGSA DALAM MERESPON GLOBALISASI. *HASBUNA : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 190–202. <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v2i1.146>
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>
- NCCNews.com. (2025). *Kemiskinan di Tanah Kaya Papua: Ketimpangan yang Tak Kunjung Usai, Bagaimana Realitanya?*
<https://www.netralnews.com/kemiskinan-di-tanah-kaya-papua-ketimpangan-yang-tak-kunjung-usai-bagaimana-realitanya/b1ZJUzVhT2NWclJCZCt6M1FxUmd5dz09>
- NRGI. (2023). *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NATURAL RESOURCES GOVERNANCE INSTITUTE AND SUBSIDIARIES FOR THE YEARS ENDED*.
- Party, J. (2013). *Is there an "Islamist Political Advantage"?* Melani Cammett, Associate Professor, Brown University Pauline Jones Luong, Professor, University of Michigan Submitted to the. November 2011, 1–23.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>
- Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 24–40. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1898>
- Sinaga, K. M., Rizanul, R. C., & Chika, P. N. (2024). *KETERKAITAN ANTARA KUALITAS GOVERNANCE DAN STABILITAS NEGARA : ANALISIS*

PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA SKANDINAVIA DAN
INDONESIA. 8(11), 53–62.

<https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/download/5260/6144/10802>

World Inequality Report 2022. (2022). In L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, & G. Zucman (Eds.), *World Inequality Report 2022*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674276598>